

PROSIDING
Seminar Nasional
SISTEM INOVASI DAERAH
(PENGEMBANGAN TEKNOLOGI UNTUK PEMBANGUNAN WILAYAH)

Keynote Speaker :

Kaspan Eka Putra, MT, PhD
DR. Zeffitni, MT

Medan, 16 Maret 2015
Hotel Madani



Penerbit :
BIRO PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI - ITM
Jl. Gedung Arca No.52 MEDAN- 20217
Telp. 061 7363771, Fax. 061 7347913

PROSIDING
Seminar Nasional

SISTEM INOVASI DAERAH :
(PENGEMBANGAN TEKNOLOGI UNTUK PEMBANGUNAN WILAYAH)

3x

Keynote Speaker :

Kaspan Eka Putra, MT, PhD
DR. Zeffitni, MT

Medan, 16 Maret 2015
Hotel Madani



Penerbit :
BIRO PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI - ITM
Jl. Gedung Arca No.52 MEDAN- 20217
Telp. 061 7363771, Fax. 061 7347913

ISSN 978-602-96473-3-4



786029 647334

KAJIAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA MEDAN

M.Fitri Rahmadana¹⁾

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dengan informasi tersebut Pemerintah Kota Medan memahami dan dapat menerapkan pendekatan partisipatif untuk menyusun program-program strategis daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan menggunakan teknik FGD yang dilakukan di 21 kecamatan, kemudian hasil FGD dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif. Jika ditinjau dari aspek pelaksanaan sosialisasi program, perencanaan dalam program dan evaluasi program dapat dikategorikan dalam skala baik. Sedangkan dari sisi pelaksanaan program, kualitas pembangunan yang dihasilkan untuk bidang pembangunan lingkungan, bidang sosial dan ekonomi masih tergolong sedang/cukup. Dari aspek kegunaan hasil pembangunan bagi masyarakat, terlihat bahwa masyarakat merasa cukup merasakan kegunaannya baik pembangunan di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan.

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, kajian ini didorong oleh perubahan besar yang tengah terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Perubahan tersebut terkait erat dengan semangat reformasi dan otonomi daerah yang bermaksud untuk lebih mengurangi peran pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan bentuk respons atas semangat perubahan tersebut. Dengan demikian penyelenggaraan otonomi daerah harus

dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan pemetaan.

Dalam kajian ini, masyarakat tersebut direpresentasikan melalui unsur-unsur *civil society* yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintahan Kota Medan. Masyarakat sendiri merupakan elemen penting kekuatan masyarakat dan proses demokratisasi di Kota Medan. Keberadaan mereka sangat strategis dalam mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Namun demikian, masalah yang seringkali muncul adalah berkenaan dengan kesiapan, kualitas

isu, kebijakan, kuantitas dan kredibilitas mereka.

B. Tujuan

Secara khusus tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana sosialisasi mengenai program partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
3. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
4. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan
5. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan

C. Tinjauan Teoritis

Secara harfiah kata partisipasi bisa diartikan sebagai ikut serta, berasal dari kata "take a part" atau diambil bagian. Lebih umum lagi kata ini bisa berarti ikut sertanya suatu kesatuan untuk ambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar lagi. Selanjutnya istilah partisipasi (*participation*) erat hubungannya dengan istilah *partnership*, yang berarti

bahwa partisipasi hendaknya harus disertai dengan sikap ikut bertanggung jawab dari satu kesatuan yang turut ambil bagian di dalam aktivitas tersebut.

Selanjutnya Slamet (2003: 8) menyatakan secara khusus mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.

Koentjaraningrat (1985: 97-105) membedakan partisipasi dalam bentuk aktifitas-aktifitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus; dan partisipasi individu diluar aktivitas bersama dalam pembangunan. Kedua tipe partisipasi yang digambarkan oleh Koentjaraningrat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi yang dimaksudkan melibatkan masyarakat desa secara luas dalam pengambilan keputusan-keputusan, mulai dari diagnosis masalah, identifikasi potensi sumber daya, perencanaan program dan penentuan program yang diusulkan hingga ke tingkat daerah, dan sampai pada pelaksanaan program

pembangunan serta pengawasan dan evaluasi.

Namun demikian, pemerintah tetap sebagai kontrol sehingga perencanaan pembangunan yang *bottom-up* tidak melenceng dari tujuan pembangunan. Pembangunan masyarakat yang direncanakan dari bawah harus menyentuh seluruh masyarakat, dan bukan untuk golongan tertentu. Untuk mengatasi adanya perbedaan-perbedaan, maka perlu dibentuk suatu institusi atau lembaga yang terintegrasi secara normatif pada kondisi yang kompleks secara keseluruhan di berbagai tingkat pelayanan dalam suatu sistem pemerintahan.

Cohen dan Uphof dalam Komarudin (1997:320) dalam partisipasi masyarakat dikenal adanya tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

- a. Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang bisa dilaksanakan, dapat atau layak dioperasionalkan)
- b. Partisipasi dalam implementasi (kontribusi sumberdaya, administrasi dan koordinasi

kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya dan informasi)

- c. Dalam kegiatan yang memberikan keuntungan (material, sosial dan personel)
- d. Dalam kegiatan evaluasi termasuk keterlibatan dalam proses yang berjalan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan asumsi bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial yang ikut dalam proses perubahan tersebut.

Pemberdayaan harus berperan untuk mewujudkan konsep masyarakat belajar atau *Concept of Societal Learning* dan caranya adalah dengan mempertemukan *top down approach* dengan *bottom-up approach* yang pada dasarnya adalah "kontradiktif" (Friedmann dalam Burke, 2004: 238).

D. Pembahasan

1. Sosialisasi dan Pengenalan Program Pembangunan

Partisipasi merupakan suatu proses maka diperlukan pendekatan pendahuluan yaitu pengenalan dan sosialisasi kegiatan. Jadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka kegiatan yang perlu dilakukan sebelum mengimplementasikan program pembangunan yang melibatkan masyarakat adalah melalui pengenalan atau sosialisasi program.

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan sosialisasi program partisipasi masyarakat dalam pembangunan tergolong baik dilihat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden.

Kecukupan jumlah anggota masyarakat yang dipilih/diundang untuk mengikuti sosialisasi/pengenalan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah cukup baik, demikian juga anggota masyarakat yang diundang untuk mengikuti sosialisasi adalah orang-orang yang tepat dan dianggap mewakili elemen masyarakat yang ada.

Disadari bahwa mensosialisasikan program bukan suatu tugas yang mudah dan bisa dikerjakan dengan hanya satu kali pertemuan. Seperti terlihat dalam hasil kajian ini bahwa masyarakat merasa

pelaksanaan sosialisasi masih terasa sangat kurang. Tingkat pengetahuan, pendidikan dan pengalaman masyarakat akan mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap apa yang diperkenalkan kepada mereka. Bagi mereka yang memiliki pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman yang rendah, mereka memerlukan rutinitas pertemuan untuk sosialisasi dilakukan sesering mungkin agar pemahaman mereka menjadi lebih baik. Banyak masyarakat yang lebih mudah mencerna informasi dari komunikasi langsung dibanding dengan komunikasi satu arah seperti membaca bahan-bahan tertulis.

Masalah kurangnya antusiasme masyarakat dalam proses sosialisasi perlu diperhatikan di masa mendatang. Pihak fasilitator sosialisasi perlu memahami seni bagaimana memotivasi masyarakat untuk hadir di dalam pertemuan dan ikut serta aktif dalam proses sosialisasi. Media-media yang digunakan perlu pula diperhatikan dalam proses sosialisasi seperti penggunaan audio visual sehingga masyarakat akan merasa lebih tertarik mengikuti proses sosialisasi dibanding hanya dengan metode ceramah.

2. Perencanaan Program Pembangunan

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa perencanaan dalam program partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Medan tergolong baik, terutama dilihat dari: keterbukaan pembentukan Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) yang dipilih oleh anggota masyarakat; BKM yang dipilih adalah berasal dari orang-orang yang cukup mampu menjalankan perannya; BKM yang dipilih cukup mewakili seluruh elemen masyarakat; ada pemberian pelatihan kepada pimpinan BKM untuk menciptakan kemampuan dalam mengelola program; cukupnya keterlibatan banyak pihak seperti lurah dan perangkatnya, pimpinan BKM dan anggotanya, dan pihak lain, dalam musyawarah untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Melihat kepada hasil kajian seperti di atas, terutama melihat kepada kelemahan-kelemahan yang ada, maka perencanaan partisipatif dalam pembangunan harus benar-benar dirancang secara sistematis, dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

3. Pelaksanaan Program Pembangunan

Hasil kajian menunjukkan bahwa dari sisi "pelaksanaan" program partisipasi masyarakat dalam pembangunan tergolong "sedang/cukup".

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga ahli (konsultan) perseorangan yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat sebagai pelaksana kegiatan secara swakelola, maka proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di tingkat masyarakat juga harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, keadilan yang non diskriminatif, dan bertanggung jawab.

Prinsip keadilan yang non diskriminatif diwujudkan dalam bentuk setiap komponen masyarakat berhak untuk berpartisipasi dan ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hasil kegiatan tersebut.

Prinsip bertanggung jawab diwujudkan dalam bentuk setiap pengeluaran dana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, seperti pencatatan penerimaan dan pengeluaran, kuitansi

pembelian dan bukti pembayaran honor, maupun secara teknis seperti kuantitas dan kualitas barang/jasa sesuai dengan rencana.

4. Evaluasi Program Pembangunan

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan evaluasi, pemantauan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan program.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa "evaluasi" program partisipasi masyarakat "belum sepenuhnya baik". Dari delapan aspek yang dinilai, terdapat empat aspek baik dan empat aspek sedang/cukup.

Aspek evaluasi yang tergolong baik adalah mengenai hal-hal sebagai berikut: tersedia sarana pengaduan yang cukup baik berkenaan dengan program pembangunan yang telah dilaksanakan; tingginya partisipasi/keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pemantauan program pembangunan yang telah dilaksanakan; dokumen tertulis mengenai hasil pemantauan suatu program pembangunan yang telah disusun

dengan baik; dan hasil pemantauan suatu program pembangunan sudah disosialisasikan/ diberitahukan kepada masyarakat.

Data-data tetuan yang diperoleh dari hasil kajian seperti dideskripsikan di atas menunjukkan bahwa proses evaluasi pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat di Kota Medan perlu diperbaiki di masa mendatang dalam bentuk tindak lanjut yang lebih baik dibanding apa yang telah dicapai pada masa lalu.

Mekanismenya adalah melakukan pemantauan dan pengawasan dengan cara mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul. Sedangkan tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah menyusun langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan, seperti antara lain koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan, klarifikasi atas ketidakjelasan, dan sebagainya, untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan.

5. Penggunaan dan Pemeliharaan Hasil Program Pembangunan

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ada keragaman respon masyarakat dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan melalui program partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dilihat dari aspek kualitas pembangunan yang dihasilkan adalah cukup baik untuk bidang pembangunan lingkungan. Namun untuk pembangunan bidang sosial dan ekonomi masih tergolong sedang/cukup. Dari aspek kegunaan hasil pembangunan bagi masyarakat, terlihat bahwa masyarakat merasa cukup merasakan kegunaannya baik pembangunan di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. Dengan demikian pemerintah perlu melanjutkan program-program seperti ini dan program yang belum dilaksanakan untuk dilakukan di masa depan. Dilihat dari aspek adanya perubahan yang jauh lebih baik sebelum dan sesudah pembangunan dilakukan, terlihat bahwa perubahan yang sangat dirasakan masyarakat adalah pembangunan di bidang lingkungan, seperti jalan dan selokan. Namun perubahan belum cukup terasa untuk pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Dari aspek "pengetahuan" dan "kesadaran" masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang

telah dihasilkan, masih tergolong "sedang" atau belum terlalu baik atas ketiga bidang pembangunan baik lingkungan, sosial dan ekonomi. Dengan demikian pemerintah di masa depan perlu mengupayakan mekanisme meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan dan upaya lain agar masyarakat secara sukarela dan berinisiatif tinggi dalam memelihara segala hasil pembangunan yang telah dihasilkan.

6. Kritik dan Harapan Masyarakat terhadap Program Pembangunan

Beberapa masukan penting yang diperoleh dari hasil kajian ini, adalah bahwa perlu sosialisasi yang lebih baik dalam program pembangunan yang melibatkan masyarakat, baik sosialisasi dalam masa pengenalan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan dalam program pembangunan, terutama instansi terkait dimulai dari kelurahan, kecamatan dan kota. Selain itu harapan keterlibatan juga berasal dari LSM dan perguruan tinggi.

Di bidang sosial masyarakat berharap diberdayakan pembangunan untuk menanggulangi masalah pendidikan bagi masyarakat miskin/tidak mampu, dan masalah penanggulangan narkoba.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam kajian ini merupakan jawaban dari ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan di awal, berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

1. Pelaksanaan sosialisasi program partisipasi masyarakat dalam pembangunan tergolong baik.
2. perencanaan dalam program partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Medan tergolong baik.
3. Dari sisi pelaksanaan program partisipasi masyarakat dalam pembangunan tergolong sedang/cukup.
4. Evaluasi program partisipasi masyarakat belum sepenuhnya baik.
5. Kualitas pembangunan yang dihasilkan adalah cukup baik

untuk bidang pembangunan lingkungan, namun untuk pembangunan bidang sosial dan ekonomi masih tergolong sedang/cukup.

6. Dari aspek kegunaan hasil pembangunan bagi masyarakat, terlihat bahwa masyarakat merasa cukup merasakan kegunaannya baik pembangunan di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi.
7. Dilihat dari aspek adanya perubahan yang jauh lebih baik sebelum dan sesudah pembangunan dilakukan, terlihat bahwa perubahan yang sangat dirasakan masyarakat adalah pembangunan di bidang lingkungan.
8. perubahan belum cukup terasa untuk pembangunan di bidang sosial dan ekonomi.
9. Dari aspek pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang telah dihasilkan, masih tergolong sedang atau belum terlalu baik atas ketiga bidang pembangunan baik lingkungan, sosial dan ekonomi.

F. Saran

Berdasarkan kesimpulan kajian di atas, maka beberapa saran diberikan untuk perencanaan program partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke masa yang akan datang.

1. Keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan dalam program pembangunan, terutama instansi terkait dimulai dari kelurahan, kecamatan dan kota. Keterlibatan juga perlu berasal dari LSM dan perguruan tinggi.
2. Perlunya diberikan pelatihan kepada para pimpinan atau pengurus lembaga swadaya masyarakat dalam mengelola pelaksanaan pembangunan agar lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan yang ada.
3. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan kesadaran mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan agar hasil yang telah terbentuk dapat bertahan lama digunakan masyarakat banyak.
4. Program pembangunan yang telah terlaksana selama ini perlu dilanjutkan di masa depan namun tidak hanya kepada bidang-bidang tertentu saja, tetapi harus

menyeluruh dan seimbang kepada seluruh aspek pembangunan di masyarakat, baik pembangunan ekonomi, sosial dan budaya

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1990. *What is Infrastructure and Why it is Important to Your Community*. The National Association of countries of The United Stated, Washington.
- Aristo, D.A. 2004. *Rejuvenasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif: Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif*. Disampaikan dalam Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004. Teknik Planologi ITB, Bandung.
- Asngan, P.S. 2001. *Peranan Agen Pembaruan/ Penyuluh Dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis*. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas

Peteruakan. Institut Pertanian Bogor.

Bourne, Peter G., 1984. *Water Sanitation, Economic & Sociological Perspective*. Academic Press Inc., London.

Bryant, Caroline, and Louise G. White, 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3ES, Jakarta.

Cheema, G. Shabbir, 1987. *Urban Shelter and Service*. Praeger, New York.

Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Penerbit ITB, Bandung

Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia, Jakarta.

Komarudin, 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*. Yayasan Realestat Indonesia-PT. Rakasindo, Jakarta.

Landecker, Wremer S., 1971. *Types of Integration and Their Measurment*, American Journal of Sociology, Vol. LVI, No. 4 January.

Midgley, James, 1986. *Community Participation, Social Development and The State*. Methuen, London.

Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, IPB Press, Bogor.

UNDP, 1998. *Urban Rural Water Sanitation*, World Bank, New York.

Yeung, Y. M. And T. G. Mc Gee, 1986. *Community Participation in Delivering Urban Services in Asia*, IDRC, Ottawa.